# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efesien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius. PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dengan

diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya, dimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri, tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan program-program investasi dan penerapan sasaran-sasaran pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagai pusat laba. Artinya, BUMD merupakan unit organisasi dalam Pemerintah Daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerahyang mendirikan, dan prestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan BUMD dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh oleh Pemerintah Daerah sebagai investor (Abdul Halim, 2008:124). Dengan demikian, selain wajib menyusun laporan keuangan daerahnya, pemda suatu provinsi/kabupaten/kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu BUMD/Perusda dilingkungannya. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran

daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalian PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru. Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi.

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surabaya mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga

ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan, selanjutnya dari laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas dapat diambil suatu judul penelitian dengan judul: **"Analisis Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Periode 2011-2015"**

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan BUMD bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya?
2. Berapa besar kontribusi laba BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya periode 2011 - 2015?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan laba BUMD di Kota Surabaya periode 2011 – 2015?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang ada, penulis akan mengetahui beberapa kesimpulan.

1. Mengetahui peranan BUMD bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya
2. Besarnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD di Kota Surabaya periode 2011 – 2015.
3. Tingkat pertumbuhan kontribusi laba BUMD periode 2011-2015.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini sebagai wacana dan masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya laba BUMD.

2. Bagi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

   Hasil Penelitian ini sebagai referensi dan bahan bacaan di perpustakaan, guna mendukung penelitian selanjutnya atau skripsi selanjutnya yang menyangkut laba BUMD.

3. Bagi Penulis

   Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dan meningkatkan pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai Laba BUMD dan Pendapatan Daerah.